



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf a maka dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak Perlu menata kembali organisasi perangkat Daerahnya khususnya Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan peraturannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- g. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;

7

- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- i. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
- k. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi negara ;
- l. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi .

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Demak .
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
  - b. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - c. Dinas Pendidikan ;
  - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
  - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
  - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
  - g. Dinas Pendapatan .

BAB III  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah seperti tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas - dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 4

- (1) Selain Kelompok jabatan-jabatan struktural, Dinas-dinas Daerah juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk .
- (3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V TATA KERJA Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 7

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengurus bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib ditolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

7

#### Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pejabat-pejabat di lingkungan Dinas / Kantor / Cabang Dinas yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti semula sampai dengan diadakannya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini .

### BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak masing-masing :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

7

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 15 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 16 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 19 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Serta segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .


#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 April 2001

**BUPATI DEMAK**




**Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH**

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 22/KEP.DPRD/2001  
tanggal 7 April 2001 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 14 April 2001

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK~~

  
Drs. TATTA ZANI, MM

Pembina Tk. I  
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001  
NOMOR 3 SERI D NOMOR 3 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-  
DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah .

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk membentuk Dinas-dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari :

- a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
- b. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
- c. Dinas Pendidikan ;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- g. Dinas Pendapatan .

Sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 17 : Cukup jelas .

=====&&&&&=====

7